

Analisis Ideosinkratik Joe Biden terkait Penangguhan Kebijakan AS "Zero tolerance"

Rihhadatul Aisy Az Zahra

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

E-mail: raaisyazhr@gmail.com

Abstract

President Joe Biden took over significant shifts in foreign and immigration policy in 2021. One striking initial measure was suspending the "Zero tolerance" policy, implemented by the previous administration in 2018. The policy sparked widespread controversy and debate, especially over the separation of immigrant families at the U.S. border specifically in Mexico. This article aims to conduct a distinctive analysis of Joe Biden in the context of the suspension of the "Zero tolerance" policy. By delving into President Biden's ideological views, personal values, and political experiences, the study seeks to understand how these factors influence U.S. foreign policy and immigration policy. Through an ideocratic analysis approach, this article explores changes in U.S. policy in the context of immigration policy and uncovers how a leader's ideology and personal views can influence political decision-making. In addition, this paper discusses the political, social, and ethical implications of suspending the "Zero tolerance" policy within the framework of ideocratic analysis. The research provides a deeper look at ideological influences in U.S. foreign policymaking and how these changes reflect President Biden's vision for the future of immigration policy.

Presiden Joe Biden mengambil alih perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri dan kebijakan imigrasi pada tahun 2021. Salah satu langkah awal yang mencolok adalah penangguhan kebijakan "Toleransi Nol", yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya pada tahun 2018. Kebijakan itu memicu kontroversi dan perdebatan luas, terutama mengenai pemisahan keluarga imigran di perbatasan AS khususnya di Meksiko. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis istimewa Joe Biden dalam konteks penangguhan kebijakan "Zero tolerance". Dengan menggali pandangan ideologis, nilai-nilai pribadi, dan pengalaman politik Presiden Biden, studi ini berupaya memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi kebijakan luar negeri dan kebijakan imigrasi AS. Melalui pendekatan analisis ideokrasi, artikel ini mengeksplorasi perubahan dalam kebijakan AS dalam konteks kebijakan imigrasi dan mengungkap bagaimana ideologi dan pandangan pribadi seorang pemimpin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Selain itu, makalah ini membahas implikasi politik, sosial, dan etika dari penangguhan kebijakan "Zero tolerance" dalam kerangka analisis ideokrasi. Penelitian ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang pengaruh ideologis dalam pembuatan kebijakan

luar negeri A.S. dan bagaimana perubahan ini mencerminkan visi Presiden Biden untuk masa depan kebijakan imigrasi.

Keywords: Joe Biden, Amerika Serikat, Mexico, *Zero tolerance*, Imigrasi

Pendahuluan

Ketika Presiden Joe Biden dilantik pada Januari 2021, Amerika Serikat (AS) memasuki era baru dalam politik luar negeri dan kebijakan imigrasi. Ini adalah momen yang sangat dinantikan bagi banyak orang, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia, karena Presiden Biden membawa visi dan ideologi yang berbeda dari pendahulunya, Presiden Donald Trump. Salah satu aspek sentral dari perubahan ini adalah penangguhan kebijakan "*Zero tolerance*" yang diterapkan oleh administrasi sebelumnya dalam konteks kebijakan imigrasi. Kebijakan "*Zero tolerance*" yang diperkenalkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018 adalah kebijakan yang memicu reaksi keras dan perdebatan yang memanas. Kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk mengatasi masalah imigrasi ilegal di AS dengan mengambil pendekatan tegas terhadap individu yang melintasi perbatasan tanpa izin. Salah satu konsekuensi paling kontroversial dari kebijakan ini adalah pemisahan keluarga imigran, yang mengakibatkan anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka dan ditempatkan dalam penahanan khusus. Reaksi keras dari masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan komunitas internasional terhadap perlakuan ini menjadi sorotan global.

Namun, dengan pemilihan Joe Biden sebagai presiden, terjadi perubahan yang mencolok dalam pendekatan AS terhadap kebijakan imigrasi. Sebagai politikus dengan pengalaman panjang di dunia politik dan hubungannya yang dekat dengan isu-isu hak asasi manusia, Biden membawa ideologi dan pandangan yang sangat berbeda dalam hal penanganan imigrasi. Sebagai imigran Amerika keturunan Irlandia, Presiden Biden sendiri memiliki pengalaman pribadi yang memengaruhi pandangannya terhadap isu ini. Dalam politik dunia, kebijakan luar negeri sebuah negara sering kali mencerminkan pandangan dan prinsip ideologis pemimpinnya. Hal ini menjadi semakin nyata ketika kita memperhatikan perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi setiap kali kepemimpinan berpindah tangan. Salah satu contoh yang mencolok dari perubahan kebijakan ini adalah ketika Presiden Joe Biden mengambil alih kepemimpinan Amerika Serikat (AS) pada Januari 2021.

Salah satu tindakan awal yang menarik perhatian adalah penangguhan kebijakan "*Zero tolerance*" yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya di sektor imigrasi. Kebijakan "*Zero tolerance*" yang diperkenalkan oleh administrasi Trump pada tahun 2018 adalah kebijakan yang memicu kontroversi di seluruh dunia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan imigrasi ilegal ke AS dan

menghasilkan pemisahan ribuan keluarga imigran di perbatasan AS. Kebijakan ini dikecam luas karena perlakuan tidak manusiawi terhadap pencari suaka dan anak-anak mereka. Kebijakan tersebut tidak hanya memunculkan ketidaksetujuan dalam negeri, tetapi juga mendapatkan kritik tajam dari masyarakat internasional. Analisis ideosinkratik akan digunakan untuk memahami bagaimana pandangan ideologis dan nilai-nilai pribadi Joe Biden memengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks ini.

Kebijakan '*Zero tolerance*' adalah kebijakan imigrasi kontroversial yang diterapkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018. Kebijakan ini menyerukan penuntutan pidana terhadap semua orang dewasa yang melintasi perbatasan AS tanpa izin, terlepas dari alasan atau keadaan mereka. Akibatnya, ribuan anak dipisahkan dari orang tua atau wali mereka dan ditahan di fasilitas yang penuh sesak dan tidak memadai. Kebijakan tersebut memicu kritik dan kemarahan luas dari organisasi hak asasi manusia, kelompok masyarakat sipil, pemimpin agama, dan masyarakat. Itu juga ditantang di pengadilan oleh beberapa tuntutan hukum. Pada Juni 2018, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri pemisahan keluarga, tetapi banyak anak tetap dalam tahanan atau tidak dapat dipersatukan kembali dengan keluarga mereka.

Pada masa diberlakukannya kebijakan *Zero tolerance*, menuai kontroversi luas. Salah satu aspek yang sangat dipertanyakan adalah pemisahan keluarga imigran yang diakibatkan oleh kebijakan ini. Bayi, anak-anak, dan orang dewasa diinterogasi, diadili, dan dipenjarakan secara terpisah, yang memicu keprihatinan besar dan kritik yang tajam dari dalam dan luar negeri. Karena permasalahan pemisahan keluarga ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan "*Zero tolerance*" tidak secara signifikan mengurangi imigrasi ilegal dan bahkan dapat mendorong orang untuk mencari jalur masuk yang lebih berbahaya.

Pada Januari 2021, Biden menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk satuan tugas untuk menyatukan kembali keluarga yang terpisah dan untuk meninjau kebijakan imigrasi pemerintahan sebelumnya. Dia juga mengeluarkan beberapa perintah eksekutif lainnya untuk membalikkan atau memodifikasi beberapa kebijakan imigrasi administrasi Trump, seperti mengakhiri pembangunan tembok perbatasan, memulihkan program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), dan mengembalikan sistem suaka.

Secara geografis, Meksiko terletak di wilayah tenggara Amerika Utara dan barat Amerika Tengah, membentang dari Samudera Pasifik hingga Laut Karibia dan Teluk Meksiko. Meksiko adalah negara yang mendominasi lanskap geografis Amerika Utara dan Tengah dengan kekayaan topografi yang menakjubkan, garis pantai yang panjang, dan ekosistem yang beragam. Letaknya yang strategis juga membuatnya menjadi pemain utama dalam perdagangan regional dan

hubungan internasional. Dari hal tersebut, artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS yang dipengaruhi oleh kepemimpinan Biden dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh ideologis dalam pembuatan kebijakan AS dengan mencakup dimensi politik, sosial, dan etika dari penanggulangan kebijakan tersebut.

Dalam menganalisis penanggulangan kebijakan "*Zero tolerance*" oleh Joe Biden pada tahun 2021, metode yang digunakan oleh penulis berupa deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dengan mengumpulkan data dalam bentuk kata atau gambar bukan angka. Kualitatif sering berisi kutipan dan menggambarkan situasi atau pandangan kata-kata. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menafsirkan fenomena sosial secara mendalam dalam secara natural. Peneliti mengumpulkan informasi yang lebih rinci dengan mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang masalah, kasus, atau peristiwa. Penelitian ini memiliki kerangka berpikir berupa konsep ideosinkratik.

Dalam menganalisis penanggulangan kebijakan "*Zero tolerance*" oleh Joe Biden pada tahun 2021, terdapat penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai gambaran mengenai konsep idiosinkratik dan konsep bandwagoning. Pertama, terdapat jurnal milik Kandel, W. A. (2018), dalam jurnal tersebut penulis mengkritik bahwa kebijakan Trump ini awalnya berjalan baik dalam mengatasi imigran ilegal namun seiring berjalannya waktu banyak anak-anak imigran terlantar karena ketatnya kebijakan ini dan dianggap Trump kurang manusiawi dalam menjalankan kebijakan ini, kebijakan imigrasi Trump tidak membawa perubahan signifikan dalam jumlah kejahatan, seperti narkoba dan penyelundupan manusia di daerah perbatasan. Sebaliknya, kebijakan tersebut berdampak buruk bagi imigran Meksiko dengan peningkatan penangkapan dan deportasi imigran ilegal, ditambah dengan kekerasan verbal, fisik, dan psikologis, termasuk pemisahan keluarga imigran ilegal, pelecehan seksual, dan bahkan kematian. Penulis menyarankan jika orang tua tidak dapat dibebaskan bersama mereka, anak-anak diperlakukan sebagai anak-anak asing tanpa pendamping dan dipindahkan ke Kantor Pemukiman Kembali Pengungsi (ORR) Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) untuk perawatan dan hak asuh.

Kedua, jurnal milik Bhattacharyya, S. (2021) menganalisis mengenai perombakan kebijakan yang mengatur tentang imigrasi terutama *Zero tolerance*. Dimulai dengan mendefinisikan undang-undang imigrasi sebagai aturan dan peraturan federal yang mengendalikan masuk dan keluarnya warga negara asing. Ini menyoroti kompleksitas sistem imigrasi AS dan dampaknya terhadap ekonomi. Penulis menguraikan kesalahan dan dampak dari struktur imigrasi sebelumnya, khususnya di bawah Pemerintahan Trump, dan rencana serta tindakan selanjutnya yang diambil oleh Pemerintahan Biden untuk mengatasinya.

Konsep Ideosinkratik

Salah satu pencetus konsep ideosinkratik dalam hubungan internasional adalah Alexander L. George, seorang ilmuwan politik dan psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu pendiri dan tokoh utama dalam bidang foreign policy analysis (FPA) atau analisis kebijakan luar negeri. George mengembangkan konsep ideosinkratik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku dan keputusan para pemimpin politik dalam hubungan internasional. George mendefinisikan ideosinkratik sebagai karakteristik khas pengambil keputusan individu, seperti nilai-nilai, keyakinan, gaya kognitif, ciri-ciri kepribadian, dan pengalaman masa lalu mereka, yang mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri atau preferensi kebijakan mereka.¹ George berpendapat bahwa analisis ideosinkratik dapat membantu memahami motivasi, minat, dan konflik yang mendasari pembuatan kebijakan luar negeri, serta menghasilkan solusi alternatif atau inovatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak para pemangku kepentingan. George juga mengembangkan beberapa metode dan teknik untuk melakukan analisis ideosinkratik, seperti personality assessment, trait analysis, cognitive analysis, operational code analysis, dan case study.²

Analisis ideosinkratik muncul dalam studi kebijakan dalam hubungan internasional untuk menggambarkan pendekatan analitik yang menitikberatkan pada peran ideologi, nilai-nilai, pandangan politik, dan pengalaman pribadi dalam pengambilan keputusan politik. Istilah ini berasal dari kata "ideo," yang merujuk pada ideologi, dan "sinkratik," yang menggambarkan aspek yang unik atau pribadi. Menganalisis data kualitatif yang berfokus pada peran ideologi dalam membentuk kebijakan dan praktik. Ideologi adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan asumsi yang memandu tindakan dan keputusan individu dan kelompok. Analisis ideosinkratik meneliti bagaimana ideologi mempengaruhi tujuan, strategi, hasil, dan dampak kebijakan dan praktik, serta bagaimana hal itu mempengaruhi persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan yang berbeda. Analisis ideosinkratik dapat membantu mengungkapkan motivasi, kepentingan, dan konflik mendasar yang membentuk pembuatan dan implementasi kebijakan.

Analisis ideosinkratik menjelaskan bagaimana pemimpin politik, pembuat kebijakan, atau aktor politik lainnya membawa elemen-elemen ideologis mereka ke dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup penelusuran latar belakang ideologis individu, pandangan mereka tentang isu-isu politik, dan nilai-nilai pribadi yang membentuk preferensi kebijakan mereka. Dalam hal ini, analisis ideosinkratik menyoroti peran individu dalam pengambilan keputusan politik dan mencoba memahami apa yang mendorong kebijakan yang diambil.

Kebijakan *Zero tolerance*

Istilah kebijakan "*zero tolerance*" dalam konteks Amerika Serikat mengacu pada pendekatan yang ketat dan seringkali tanpa kompromi terhadap penegakan hukum atau kebijakan pemerintah tertentu. Intinya, ini menandakan sikap di mana setiap pelanggaran hukum atau peraturan tertentu akan dipenuhi dengan penegakan yang konsisten dan seragam, biasanya melibatkan hukuman atau konsekuensi yang keras. Konsep "*zero tolerance*" telah banyak diterapkan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, imigrasi, peradilan pidana, dan pengendalian narkoba.³ Tujuannya adalah untuk menciptakan sikap yang jelas dan tak tergoyahkan terhadap perilaku atau kegiatan tertentu yang dianggap tidak diinginkan atau ilegal. Di bawah ini, kami menyelidiki berbagai bidang di mana kebijakan "toleransi nol" telah diterapkan untuk menggambarkan sifatnya yang beragam.

Kebijakan "*Zero tolerance*" dalam imigrasi mengacu pada pendekatan ketat dan tak kenal ampun yang diambil oleh pemerintah, khususnya dalam konteks kontrol perbatasan dan penegakan imigrasi. Kebijakan ini ditandai dengan penuntutan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang melanggar undang-undang imigrasi, termasuk mereka yang memasuki suatu negara tanpa izin yang tepat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencegah imigrasi ilegal dengan menerapkan konsekuensi keras bagi mereka yang melintasi perbatasan tanpa dokumentasi yang diperlukan.

Salah satu contoh paling menonjol dari kebijakan "Toleransi Nol" dalam imigrasi terjadi di Amerika Serikat, khususnya selama pemerintahan Trump pada tahun 2018. Di bawah kebijakan ini, orang dewasa yang tertangkap melintasi perbatasan AS-Meksiko tanpa dokumentasi yang tepat dituntut karena masuk secara ilegal, yang mengakibatkan pemisahan paksa keluarga.⁴ Anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka dan ditempatkan di fasilitas penahanan, sementara orang dewasa menghadapi tuntutan pidana.

Alasan di balik kebijakan "*Zero tolerance*" dalam imigrasi adalah untuk mengirim pesan yang jelas bahwa masuk secara ilegal ke suatu negara tidak akan ditoleransi. Para advokat berpendapat bahwa pendekatan ini menghalangi individu untuk mencoba melintasi perbatasan tanpa izin, karena prospek penuntutan dan pemisahan keluarga berfungsi sebagai pencegah yang kuat.

Namun, kebijakan "*Zero tolerance*" telah mengumpulkan kontroversi dan kritik yang signifikan. Para kritikus berpendapat bahwa hal itu mengarah pada krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Memisahkan anak-anak dari orang tua mereka dipandang tidak manusiawi dan merusak secara psikologis, seringkali mengakibatkan trauma jangka panjang bagi anak-anak yang terlibat. Selain itu, implementasi kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan proporsionalitas konsekuensinya.

Kebijakan ini mengarahkan jaksa-jaksa federal di perbatasan selatan untuk menuntut secara pidana semua kasus yang melibatkan masuk secara ilegal ke Amerika Serikat, tanpa memperhatikan alasan atau keadaan mereka. Akibatnya, ribuan anak dipisahkan dari orang tua atau wali mereka dan ditahan di fasilitas-fasilitas yang sesak dan tidak memadai.⁵ Kebijakan ini menimbulkan kritik dan kemarahan luas dari organisasi-organisasi hak asasi manusia, kelompok-kelompok masyarakat sipil, pemimpin-pemimpin agama, dan publik. Kebijakan ini juga digugat di pengadilan oleh beberapa gugatan hukum.

Meskipun tujuan untuk mencegah imigrasi ilegal adalah valid, implementasi kebijakan tersebut menimbulkan tantangan etis dan praktis yang signifikan. Mencapai keseimbangan yang tepat antara menegakkan hukum imigrasi dan menegakkan hak asasi manusia tetap menjadi tantangan berkelanjutan bagi pemerintah. Kebijakan tersebut telah memicu perdebatan sengit tentang perlakuan terhadap migran dan tanggung jawab negara-negara untuk mengatasi penyebab utama migrasi, seperti kekerasan, penganiayaan, dan kesulitan ekonomi. Kebijakan "Toleransi Nol" dalam imigrasi merupakan pendekatan ketat untuk kontrol perbatasan, menekankan penegakan hukum imigrasi yang ketat. Meskipun bertujuan untuk mencegah imigrasi ilegal, konsekuensi kebijakan tersebut telah memicu kontroversi karena kekhawatiran tentang hak asasi manusia, keadilan, dan potensi krisis kemanusiaan yang tidak diinginkan. Ketika negara-negara bergulat dengan tantangan imigrasi, menemukan pendekatan yang komprehensif dan etis untuk kontrol perbatasan tetap menjadi masalah penting di panggung global.

Analisis Idiosinkratik Donald Trump

Donald Trump adalah mantan presiden Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan *zero tolerance* imigrasi pada tahun 2018. Kebijakan ini mengarahkan jaksa-jaksa federal di perbatasan selatan untuk menuntut secara pidana semua kasus yang melibatkan masuk secara ilegal ke Amerika Serikat, tanpa memperhatikan alasan atau keadaan mereka. Akibatnya, ribuan anak dipisahkan dari orang tua atau wali mereka dan ditahan di fasilitas-fasilitas yang sesak dan tidak memadai. Kebijakan ini menimbulkan kritik dan kemarahan luas dari organisasi-organisasi hak asasi manusia, kelompok-kelompok masyarakat sipil, pemimpin-pemimpin agama, dan publik. Kebijakan ini juga digugat di pengadilan oleh beberapa gugatan hukum. Pada Juni 2018, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk mengakhiri pemisahan keluarga, tetapi banyak anak yang tetap berada dalam tahanan atau tidak dapat dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

Analisis idiosinkratik Donald Trump dalam membuat kebijakan *zero tolerance* imigrasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dan teknik, seperti penilaian kepribadian, analisis sifat, analisis kognitif, analisis kode

operasional, dan studi kasus. Ideologi Trump lebih sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme, keamanan, kedaulatan, eksklusivitas, dan pencegahan. Dia melihat imigrasi sebagai ancaman dan beban bagi Amerika Serikat yang membutuhkan pendekatan keras dan hukuman yang mengutamakan penegakan hukum dan pencegahan daripada perlindungan dan integrasi. Dia juga mengabaikan atau melanggar banyak kewajiban dan prinsip hak asasi manusia internasional, terutama yang terkait dengan anak-anak.

Sifat kepribadian Trump yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan kebijakannya adalah otoriterisme, narsisme, machiavellianisme, agresivitas, impulsivitas, dan dogmatisme. Sifat-sifat ini membuatnya cenderung tidak peduli dengan kesejahteraan atau hak-hak orang lain, terobsesi dengan diri sendiri dan pencitraannya, manipulatif dan oportunis dalam mencapai tujuannya, mudah marah dan menyerang lawan-lawannya, tidak sabar dan tidak konsisten dalam bertindak, serta tidak mau mendengarkan atau belajar dari pendapat atau fakta-fakta yang bertentangan dengan keyakinannya.

Gaya kognitif Trump yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan kebijakannya adalah simplistik, dualistik, intuitif, emosional, dan konfirmatoris. Gaya kognitif ini membuatnya cenderung menyederhanakan masalah-masalah kompleks menjadi hitam-putih, membagi dunia menjadi teman atau musuh, mengandalkan naluri atau perasaannya daripada logika atau bukti-bukti, dipengaruhi oleh suasana hati atau afeksi-nya, dan mencari atau menerima informasi-informasi yang mendukung pandangannya dan mengabaikan atau menolak informasi-informasi yang menantanginya. Kode operasional Trump yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan kebijakannya adalah realisme ofensif. Kode operasional ini membuatnya cenderung percaya bahwa lingkungan internasional adalah anarkis dan kompetitif, bahwa negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka yang egois dan materialis, bahwa kekuatan militer dan ekonomi adalah sumber utama pengaruh dan keamanan, bahwa konflik dan perang adalah hal yang tak terhindarkan dan kadang-kadang diperlukan, dan bahwa kerjasama dan institusi internasional adalah lemah dan tidak efektif.

Dari analisis idiosinkratik di atas, dapat disimpulkan bahwa Donald Trump memiliki ideologi, sifat kepribadian, gaya kognitif, dan kode operasional yang membuatnya cenderung membuat kebijakan *zero tolerance* imigrasi yang tidak manusiawi, tidak rasional, tidak proporsional, dan tidak efektif. Kebijakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia para imigran, terutama anak-anak, tetapi juga merugikan kepentingan Amerika Serikat sendiri dalam jangka panjang. Kebijakan ini juga menimbulkan reaksi negatif dari dunia internasional, baik dari negara-negara sahabat maupun lawan. Kebijakan ini juga tidak berhasil menurunkan angka imigrasi ilegal atau meningkatkan keamanan perbatasan.

Kebijakan ini juga tidak memperhatikan penyebab atau solusi dari masalah imigrasi yang kompleks dan multifaset.

Analisis Ideosinkratik Joe Biden

Keputusan Biden untuk menanggukhan kebijakan "Toleransi Nol" mencerminkan pendekatan ideosrektik, yang berakar pada nilai-nilai dan keyakinannya yang dipegang teguh. Joe Biden menanggukhan kebijakan *zero tolerance* imigrasi pada tahun 2021. Biden menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk membentuk sebuah tim tugas untuk mempertemukan kembali keluarga-keluarga yang terpisah dan untuk meninjau kebijakan-kebijakan imigrasi dari pemerintahan sebelumnya. Dia juga mengeluarkan beberapa perintah eksekutif lainnya untuk membalikkan atau mengubah beberapa kebijakan imigrasi dari pemerintahan Trump, seperti menghentikan pembangunan tembok perbatasan, mengembalikan program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), dan mengembalikan sistem suaka.

Sebagai politisi dengan komitmen jangka panjang terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, ideologi Biden menekankan empati dan kasih sayang, sehingga dia menganjurkan kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi. Ideologi Biden lebih sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keragaman, belas kasih, dan kerjasama. Dia mengakui bahwa imigrasi adalah sebuah isu yang kompleks dan multifaset yang membutuhkan pendekatan holistik dan manusiawi yang menghormati hak-hak dan kebutuhan para migran, pengungsi, pencari suaka, dan keluarga mereka. Dia juga menyadari bahwa Amerika Serikat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi standar dan norma hak asasi manusia internasional, terutama yang terkait dengan anak-anak.

Biden merupakan seseorang yang demokratis, empatik, pragmatis, kolaboratif, dan adaptif. Sifat-sifat ini membuatnya cenderung peduli dengan kesejahteraan atau hak-hak orang lain, terbuka dengan diri sendiri dan orang lain tentang kekuatan dan kelemahannya, realistis dan fleksibel dalam mencapai tujuannya, mencari dan menerima masukan atau dukungan dari orang-orang yang berbeda atau berpengalaman, dan bersedia untuk belajar atau berubah sesuai dengan situasi atau fakta-fakta baru.

Biden memiliki gaya kognitif yang cenderung kompleks, integratif, rasional, reflektif, dan kritis. Gaya kognitif ini membuatnya cenderung memahami masalah-masalah kompleks dari berbagai sudut pandang, mencari atau menciptakan solusi-solusi yang seimbang atau komprehensif, menggunakan logika atau bukti-bukti dalam berpikir atau bertindak, mengevaluasi atau mempertimbangkan dampak atau konsekuensi dari pilihan-pilihannya, dan

menantang atau mempertanyakan asumsi-asumsi atau keyakinan-keyakinan yang tidak beralasan atau tidak berdasar.

Biden yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan kebijakannya memiliki kode operasional yang cenderung kearah liberalisme defensif. Kode operasional ini membuatnya cenderung percaya bahwa lingkungan internasional adalah kompleks dan saling tergantung, bahwa negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka yang beragam dan dinamis, bahwa kekuatan lunak dan kerjasama adalah sumber utama pengaruh dan keamanan, bahwa konflik dan perang adalah hal yang dapat dicegah dan dihindari, dan bahwa kerjasama dan institusi internasional adalah penting dan efektif.

Dari analisis idiosinkratik di atas, dapat disimpulkan bahwa Joe Biden memiliki ideologi, sifat kepribadian, gaya kognitif, dan kode operasional yang membuatnya mengambil keputusan untuk menanggukuhkan kebijakan *zero tolerance* imigrasi yang menurutnya tidak manusiawi, tidak rasional, tidak proporsional, dan tidak efektif. Kebijakan ini melanggar hak asasi manusia para imigran, terutama anak-anak, dan merugikan kepentingan Amerika Serikat sendiri dalam jangka panjang. Kebijakan ini juga menimbulkan reaksi negatif dari dunia internasional, baik dari negara-negara sahabat maupun lawan, tidak berhasil menurunkan angka imigrasi ilegal atau meningkatkan keamanan perbatasan, tidak memperhatikan penyebab atau solusi dari masalah imigrasi yang kompleks dan multifaset. Biden berusaha untuk mengubah atau menghapus kebijakan ini dan menggantinya dengan kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan hak asasi manusia, kepentingan nasional, dan norma internasional. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan integrasi kepada para imigran, terutama anak-anak, serta meningkatkan kerjasama dan stabilitas di wilayah perbatasan dan dunia.

Analisis ideosinkratik Biden memprioritaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, terutama CRC. Ideologi Biden lebih selaras dengan nilai-nilai martabat manusia, kesetaraan, keragaman, kasih sayang, dan kerja sama. Biden mengakui bahwa imigrasi adalah masalah yang kompleks dan beragam yang membutuhkan pendekatan holistik dan manusiawi yang menghormati hak dan kebutuhan migran, pengungsi, pencari suaka, dan keluarga mereka. Dia juga mengakui bahwa AS memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi standar dan norma hak asasi manusia internasional, terutama yang terkait dengan anak-anak. Di sisi lain, ideologi Trump lebih selaras dengan nilai-nilai nasionalisme, keamanan, kedaulatan, dan pencegahan. Dia memandang imigrasi sebagai ancaman dan beban bagi AS yang membutuhkan pendekatan keras dan hukuman yang memprioritaskan penegakan dan pencegahan atas perlindungan dan integrasi. Dia juga mengabaikan atau melanggar banyak kewajiban dan

prinsip hak asasi manusia internasional, terutama yang berkaitan dengan anak-anak.

CRC adalah perjanjian internasional yang menetapkan hak-hak setiap anak di dunia. Ini telah diratifikasi oleh setiap negara kecuali AS. CRC mencakup berbagai hak untuk anak-anak, seperti hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, kesehatan, pendidikan, partisipasi, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, kesatuan keluarga, identitas, kebangsaan, ekspresi, privasi, budaya, agama, dll. CRC juga menetapkan empat prinsip umum yang harus memandu semua tindakan mengenai anak-anak: 1) non-diskriminasi; 2) kepentingan terbaik anak; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pembangunan; 4) menghormati pandangan anak.

Analisis ideosinkratik Biden tentang penangguhan kebijakan *Zero tolerance* lebih konsisten dengan CRC daripada analisis ideosinkratik Trump tentang implementasinya. Analisis Biden mengakui bahwa anak-anak memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi terlepas dari status imigrasi atau asal mereka. Dia juga menganggap bahwa memisahkan anak-anak dari keluarga mereka berbahaya bagi perkembangan dan kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial mereka. Dia juga menghargai pandangan dan pengalaman anak-anak sebagai relevan dan penting untuk menginformasikan keputusan kebijakan. Analisis Trump mengabaikan atau menyangkal bahwa anak-anak memiliki hak atau kepentingan yang berbeda dari orang dewasa atau dari negara. Biden juga menganggap bahwa memisahkan anak-anak dari keluarga mereka adalah tindakan yang diperlukan atau dibenarkan untuk mencegah imigrasi ilegal atau untuk menegakkan hukum, mengabaikan atau menolak pandangan dan pengalaman anak-anak sebagai tidak relevan atau tidak penting untuk pembuatan kebijakan.

Reformasi Imigrasi Setelah Penangguhan Kebijakan “Zero tolerance”

Reformasi imigrasi pemerintahan Biden bertujuan untuk menciptakan sistem imigrasi yang lebih adil, tertib, dan manusiawi yang menghormati hak dan kebutuhan imigran, pengungsi, pencari suaka, dan keluarga mereka. Reformasi juga berusaha untuk menyelaraskan kebijakan imigrasi AS dengan standar dan prinsip hak asasi manusia internasional, terutama yang berkaitan dengan anak-anak. Reformasi imigrasi pemerintahan Biden menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, seperti sengketa hukum, oposisi politik, penundaan administrasi, kendala sumber daya, dan opini publik. Reformasi juga harus menyeimbangkan kepentingan dan nilai-nilai yang bersaing, seperti keamanan, ekonomi, keragaman, dan kasih sayang.

Reformasi imigrasi pemerintahan Biden memiliki dampak signifikan pada kehidupan dan kesejahteraan jutaan orang yang terpengaruh oleh sistem

imigrasi AS, baik di dalam maupun di luar negeri. Reformasi juga memiliki implikasi bagi peran dan reputasi AS di dunia, serta hubungannya dengan negara dan wilayah lain, terutama di Belahan Barat. Reformasi imigrasi pemerintahan Biden tidak statis atau final, tetapi dinamis dan berkembang. Reformasi dapat berubah atau dimodifikasi tergantung pada perubahan keadaan dan realitas situasi imigrasi. Reformasi juga bergantung pada kerja sama dan kolaborasi berbagai aktor dan sektor, seperti Kongres, pengadilan, negara bagian, daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra internasional.

Beberapa reformasi imigrasi khusus yang telah diusulkan atau diterapkan Biden adalah, menciptakan jalur delapan tahun menuju kewarganegaraan bagi sekitar 10,5 juta imigran tidak sah yang tinggal di AS pada 2017, serta melestarikan dan memperluas program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) yang memberikan bantuan deportasi dan izin kerja kepada imigran tidak sah yang datang ke AS sebagai anak-anak. Meningkatkan batas tahunan penerimaan pengungsi dari 15.000 di bawah pemerintahan Trump menjadi 125.000 di bawah pemerintahan Biden, dan menciptakan program perlindungan kemanusiaan global untuk orang-orang terlantar yang tidak memenuhi syarat sebagai pengungsi. Mengakhiri pembangunan tembok perbatasan dan berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan keamanan perbatasan, serta menetapkan rencana empat tahun, \$ 4 miliar untuk mengatasi akar penyebab migrasi dari Amerika Tengah, seperti kemiskinan, kekerasan, dan korupsi. Memulihkan sistem suaka dengan mengakhiri kebijakan Protokol Perlindungan Migrasi (MPP) atau "Tetap di Meksiko" yang mengharuskan pencari suaka di perbatasan AS-Meksiko untuk menunggu di Meksiko sementara klaim mereka diproses, dan dengan meningkatkan akses ke penasihat hukum, bantuan kemanusiaan, dan manajemen kasus untuk pencari suaka. Memodernisasi sistem imigrasi legal dengan membersihkan backlog, mengurangi waktu tunggu, menghilangkan batas visa per negara, meningkatkan jumlah visa keragaman, menciptakan kategori visa baru untuk pengembangan ekonomi regional, dan memberikan lebih banyak fleksibilitas dan dukungan bagi siswa dan pekerja internasional.

Kesimpulan

Penangguhan kebijakan "*Zero tolerance*" oleh Presiden Joe Biden, memberikan contoh mencolok dari pendekatan ideosentris terhadap pemerintahan. Keputusan ini berakar pada nilai-nilai, keyakinan, dan komitmennya yang dipegang teguh terhadap empati, kasih sayang, dan hak asasi manusia. Ini mencerminkan visi politiknya untuk Amerika yang lebih inklusif dan penuh kasih, komitmen sosialnya untuk memperlakukan imigran dengan bermartabat, dan kewajiban etisnya untuk menegakkan standar internasional dan hak asasi manusia. Ketika Amerika Serikat terus bergulat dengan reformasi

imigrasi, analisis ideosrektik Biden tentang penangguhan kebijakan "Zero tolerance" kemungkinan akan menjadi momen yang menentukan dalam kepresidenannya dan akan terus membentuk kebijakan imigrasi negara dan hubungan internasional.

Daftar Pustaka

- Muhammad Nadeem Mirza. The Role of Leadership and Idiosyncrasy in US Foreign Policy Towards Pakistan. *Journal of Contemporary Studies*, 2018, 7 (2), pp.33-52. ffhalshs-02951741
- "1.1: What Is Comparative Politics?" *Social Sci LibreTexts*, 22 Feb. 2022, [https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Political_Science_and_Civics/Introduction_to_Comparative_Government_and_Politics_\(Bozonelos_et_al.\)/01%3A_Why_Study_Comparative_Politics/1.01%3A_What_is_Comparative_Politics](https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Political_Science_and_Civics/Introduction_to_Comparative_Government_and_Politics_(Bozonelos_et_al.)/01%3A_Why_Study_Comparative_Politics/1.01%3A_What_is_Comparative_Politics).
- Analisa Model Teori Idiosinkratik Terhadap Kebijakan Luar Negeri Perdana Menteri John Howard - Studocu*. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-bina-nusantara/international-relations/analisa-model-teori-idiosinkratik-terhadap-kebijakan-luar-negeri-perdana-menteri-john-howard-1996-2007-dalam-imigran-gelap-di-australia/8041674>. Accessed 21 Oct. 2023.
- Bhattacharyya, S. (2021). *Visas and immigration in 2021 under the biden administration* (SSRN Scholarly Paper 3872468). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3872468>
- "Biden Justice Department Officially Rescinds Trump 'Zero tolerance' Policy." *NBC News*, 26 Jan. 2021, <https://www.nbcnews.com/politics/immigration/biden-justice-department-officially-rescinds-trump-zero-tolerance-migrant-family-n1255762>.
- Borman, G. D., Pyne, J., Rozek, C. S., & Schmidt, A. (2022). A replicable identity-based intervention reduces the black-white suspension gap at scale. *American Educational Research Journal*, 59(2), 284–314. <https://doi.org/10.3102/00028312211042251>
- Heinrich, C. J. (2018). Presidential address: "A thousand petty fortresses": administrative burden in u. S. Immigration policies and its consequences. *Journal of Policy Analysis and Management*, 37(2), 211–239. <https://doi.org/10.1002/pam.22046>
- House, The White. "FACT SHEET: The Biden Administration Blueprint for a Fair, Orderly and Humane Immigration System." *The White House*, 27 July 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements->

- releases/2021/07/27/fact-sheet-the-biden-administration-blueprint-for-a-fair-orderly-and-humane-immigration-system/.
- House, The White. "Remarks by President Biden and Attorney General Garland on Gun Crime Prevention Strategy." *The White House*, 24 June 2021, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/06/23/remarks-by-president-biden-and-attorney-general-garland-on-gun-crime-prevention-strategy/>.
- "How a Trump-Era Policy That Separated Thousands of Migrant Families Came to Pass." *PBS NewsHour*, 13 Aug. 2022, <https://www.pbs.org/newshour/show/how-a-trump-era-policy-that-separated-thousands-of-migrant-families-came-to-pass>.
- Kandel, W. A. (2018). The Trump administration's "zero tolerance" immigration enforcement policy. Congressional Research Service, 5, 1-26.
- Krogstad, Jens Manuel, and Ana Gonzalez-Barrera. "Key Facts about U.S. Immigration Policies and Biden's Proposed Changes." *Pew Research Center*, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/01/11/key-facts-about-u-s-immigration-policies-and-bidens-proposed-changes/>. Accessed 21 Oct. 2023.
- Kundu, V. (2020). Conflict Competence: An Exploration of its importance and skills. *International Journal of Peace Education and Development*, 8(1). <https://doi.org/10.30954/2454-9525.01.2020.1>
- McCune, V., & Entwistle, N. (2000, August). The deep approach to learning: analytic abstraction and idiosyncratic development. In *Innovations in Higher Education Conference* (Vol. 30). Helsinki: University of Helsinki.
- Murphy, K., & Mazerolle, L. (2018). Policing immigrants: Using a randomized control trial of procedural justice policing to promote trust and cooperation. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 51(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/0004865816673691>
- Narea, Nicole. "Biden Rescinds Trump's 'Zero-Tolerance' Policy That Enabled Family Separation." *Vox*, 27 Jan. 2021, <https://www.vox.com/policy-and-politics/2021/1/27/22252294/biden-zero-tolerance-family-separation-trump>.
- President Biden on 2nd Amendment and Zero tolerance Policy for Gun Dealers.* *www.youtube.com*, <https://www.youtube.com/watch?v=mMUQU4m9Z5U>. Accessed 21 Oct. 2023.
- Q&A: *Trump Administration's "Zero-Tolerance" Immigration Policy | Human Rights Watch*. 16 Aug. 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/08/16/qa-trump-administrations-zero-tolerance-immigration-policy>.

- RAHMADHANI, PUTRI. *PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI IMIGRAN ILEGAL DI PERBATASAN DENGAN MEKSIKO*. 2023. Universitas Andalas, <http://scholar.unand.ac.id/206419/7/FULL%20SKRIPSI.pdf>.
- Semotiuk, Andy J. "Biden's Immigration Reforms: New Initiatives Replace Early Setbacks." *Forbes*, <https://www.forbes.com/sites/andyjsemotiuk/2023/08/22/bidens-immigration-reforms-new-initiatives-replace-early-setbacks/>. Accessed 21 Oct. 2023.
- Triana, Y., & Zulaiha, D. (2021). Investigating aspects affecting joe biden's speech on the inauguration of the 46th president of the united states: A political discourse analysis. *Ahmad Dahlan Journal of English Studies*, 8(2), 164. <https://doi.org/10.26555/adjes.v8i2.19956>
- You, H. (2022). *A proximization study of critical discourse analysis—A case study of president joe biden's 2022 state of the union address*. <https://www.semanticscholar.org/paper/A-Proximization-Study-of-Critical-Discourse-A-Case-You/20b5bc1078acb07844651e78dd040456cbf93302>

Endnote

¹ Muhammad Nadeem Mirza. The Role of Leadership and Idiosyncrasy in US Foreign Policy Towards Pakistan. *Journal of Contemporary Studies*, 2018, 7 (2), pp.33-52. fffhalshs-02951741

² Ibid.

³ President Donald J. Trump Is Acting to Enforce the Law, While Keeping Families Together The White House. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-acting-enforce-law-keeping-families-together/>. Accessed 21 Oct. 2023.

⁴ Narea, Nicole. "Biden Rescinds Trump's 'Zero-Tolerance' Policy That Enabled Family Separation." *Vox*, 27 Jan. 2021, <https://www.vox.com/policy-and-politics/2021/1/27/22252294/biden-zero-tolerance-family-separation-trump>.

⁵ "How a Trump-Era Policy That Separated Thousands of Migrant Families Came to Pass." *PBS NewsHour*, 13 Aug. 2022, <https://www.pbs.org/newshour/show/how-a-trump-era-policy-that-separated-thousands-of-migrant-families-came-to-pass>.